

APBN 2024: MODAL PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

11

Ariesy Tri Mauleny*

Abstrak

APBN sehat merupakan modal transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pesta demokrasi baik pileg, pilpres, maupun pilkada serentak di sepanjang tahun 2024, berpotensi menambah ketidakpastian domestik di tengah tantangan global yang masih berlanjut. Tulisan ini mengkaji sejauh mana APBN 2024 dapat mengantisipasinya sehingga tetap efektif sebagai modal bagi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR khususnya Komisi XI, perlu memastikan efektivitas langkah pemerintah dalam implementasi UU Cipta Kerja, UU HPP, UU HKPD, dan UU P2SK. Khususnya dalam memenuhi target pendapatan negara dan menghadirkan *spending better* yang besar multiplier effect-nya di masyarakat. Akhirnya, melalui kebijakan fiskal yang sehat dan akomodatif, APBN 2024 diarahkan bukan hanya menopang laju perekonomian nasional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. Sehingga terwujud pemerataan yang dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sehat menjadi modal penting untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu masyarakat sejahtera dan Indonesia maju. APBN bukan sekedar angka, tetapi instrumen yang memiliki arah dan strategi.

Peningkatan penerimaan negara dan penerapan *spending better* menjadi bukti APBN tetap prima dalam menstimulus perekonomian (2015-2022) (liputan6.com, 30 September 2023).

Kebijakan fiskal yang efektif juga menjadi salah satu modal dalam keberhasilan Indonesia menangani

* Analisis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: ariesy.mauleny@dpr.go.id.



pandemi Covid-19. Perekonomian nasional terbilang pulih lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5%. Kinerja fiskal yang sehat juga terlihat pada beberapa forum internasional seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan KTT ASEAN, yang tetap terselenggara di tengah ketidakpastian global dan pandemi kemarin. Namun, optimisme yang muncul tetap harus diwaspadai, mengingat potensi permasalahan dalam persiapan dan penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024. Tulisan ini menganalisis bagaimana APBN 2024 dapat dijadikan sebagai modal strategis untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, meskipun di tengah ketidakpastian domestik dan tantangan global.

Postur APBN 2024 dan Tantangan Global

DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 menyepakati sejumlah asumsi dasar makro APBN 2024 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000/USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, ICP disepakati USD82/barel, dan *lifting* minyak 635 ribu barel per hari, serta *lifting* gas setara 1,033 juta barel per hari. Rapat Paripurna juga menyepakati komitmen bersama untuk terus menjaga resiliensi perekonomian di tahun 2024, sehingga tingkat kemiskinan dan gini ratio turun di kisaran 6,5%-7,5% dan 0,374-0,377. Tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan turun pada kisaran 5,0%-5,7%, dengan peningkatan kualitas SDM melalui IPM yang mencapai 73,99-74,02 (Risalah Rapat

Paripurna, 21 September 2023).

Melalui pembahasan yang konstruktif di tingkat komisi maupun Badan Anggaran, akhirnya APBN 2024 disepakati. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.802,29 triliun dan belanja negara diperkirakan sebesar Rp3.325 triliun, dengan defisit di kisaran Rp522,82 triliun (2,29% terhadap PDB). Postur APBN 2024 didesain ekspansif, terarah, dan terukur, sehingga diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (cnbcindonesia.com, 19 September 2023).

World Economic Outlook memperkirakan, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global berada pada level 3,1%, sedangkan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,2% (IMF, Januari 2023). Hal ini tentu melahirkan optimisme, ke depan Indonesia berpeluang keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. APBN 2024 memiliki peran penting karena berada di tahun terakhir masa bakti pemerintah. Tahun penyelesaian program-program strategis dan diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk terjadinya transformasi pemerintahan dan ekonomi.

Namun demikian, tantangan global pascapandemi semakin berat, berpotensi datang dari berbagai sumber risiko, dan pasti sulit diadaptasi secara cepat. Ketegangan geopolitik yang masih tinggi, potensi datangnya pandemi berikutnya, perubahan iklim ekstrim, disrupsi teknologi, dampak digitalisasi, termasuk pelambatan ekonomi China yang berpotensi menurunkan tingkat permintaan (ekbis.sindonews.com, 2 Oktober 2023).

Berbagai sumber risiko global tersebut, tidak kemudian menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024. Pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menambah berat batu uji bagi postur APBN 2024 yang ditetapkan pemerintah bersama DPR RI. Sejauh mana keberhasilan dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ke depan?

Keberhasilan APBN 2024 sangat ditentukan oleh terpenuhinya target pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang direncanakan melalui penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun, PNPB sebesar Rp473,0 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp430,6 miliar. Pemenuhan target tersebut salah satunya dengan terus menciptakan iklim investasi dan ekosistem kemudahana berusaha melalui implementasi terbaik dari UU Cipta Kerja.

Upaya lain memenuhi target penerimaan pajak dilakukan melalui perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Implementasi NIK sebagai NPWP, penyusunan daftar sasaran prioritas, serta ekstensifikasi pajak melalui transaksi afiliasi dan ekonomi digital, akan menjadi kegiatan prioritas dalam meningkatkan penerimaan pajak, selain pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan (kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023).

DPR dalam hal ini Komisi XI, melalui fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa langkah pemerintah dalam memenuhi target pendapatan negara, tetap memperhatikan keberlanjutan

dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta memenuhi aspek keadilan dalam menjalankan sistem perpajakan. Diharapkan bukan hanya produktivitas terjaga, tetapi juga terjadi perluasan skala dan jenis usaha, serta penguatan daya saing global, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi bagi pendapatan negara.

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Meski di tengah tantangan global dan ketidakpastian domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di atas 5,0% dalam tujuh kuartal berturut-turut. Hal tersebut diyakini dapat mendorong fundamental ekonomi domestik lebih kokoh dan stabil, dengan ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang relatif lebih rendah, serta kontribusi kinerja ekspor yang mendorong konsistensi penguatan neraca transaksi berjalan (kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023). Utang pemerintah juga terkendali di level 38% terhadap PDB. Jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara G20 seperti Jepang 266%, Amerika 137%, dan Singapura 131% (finance.detik.com, 29 September 2023).

Hal tersebut tentu menjadi modal dalam menjaga postur APBN 2024 yang sehat, sehingga dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN 2024 yang sehat terjadi ketika fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan regulasi, optimal dalam mendukung konsolidasi fiskal, di samping efektif menopang laju perekonomian. Konsolidasi yang mendorong keseimbangan primer menuju positif, dan mengendalikan rasio utang dalam batas toleransi. Hal tersebut

akan menjadi kekuatan di tengah tantangan global dan ketidakpastian domestik ke depan.

Artinya, kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan ruang fiskal dan melaksanakan belanja berkualitas (*spending better*) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan APBN 2024 dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana pilihan belanja berkualitas-prioritas, yang mencapai Rp3.304,1 triliun (14,5% terhadap PDB) dilakukan pemerintah? APBN 2024 merencanakan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun (74,0%) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun (26%). Sejauh mana list belanja yang disusun, efektif menopang laju perekonomian nasional? Yang dibutuhkan adalah kemampuan pemerintah dalam menyusun belanja prioritas yang strategis sehingga dapat memperbesar *multiplier effect*-nya di masyarakat. Tentunya, menjaga harmonisasi pelaksanaan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dalam sebuah bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pada akhirnya, penguatan *spending better* dapat mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan yang berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*). Efisiensi dan efektivitas belanja negara, juga tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik

antar-golongan maupun antar-wilayah. Dengan begitu terwujud pemerataan dalam segala aspeknya yang dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Menjaga postur APBN 2024 yang sehat, menjadi modal penting dalam akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tidak dipungkiri terdapat potensi ketidakpastian yang harus diwaspadai seiring dengan adanya agenda politik nasional di sepanjang tahun 2024, mulai dari pilpres, pileg, maupun pilkada serentak. Terjaganya fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan regulasi dari APBN 2024, akan menjadi kekuatan di tengah ketidakpastian domestik dan tantangan global.

Komisis IX DPR RI perlu memastikan efektivitas langkah pemerintah dalam implementasi UU Cipta Kerja, UU HPP, UU HKPD, dan UU P2SK, khususnya dalam memenuhi target pendapatan negara dan menghadirkan *spending better* yang besar *multiplier effect*-nya di masyarakat. Akhirnya, melalui kebijakan fiskal yang sehat dan akomodatif, APBN 2024 diarahkan bukan hanya menopang laju perekonomian nasional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antar-wilayah. Sehingga terwujud pemerataan yang dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- “Bukti Nyata Belanja Berkualitas Pemerintah dalam Sewindu, Percepat Transformasi Ekonomi”, liputan6.com, 30 September 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5410642/bukti-nyata-belanja-berkualitas-pemerintah-dalam-sewindu-percepat-transformasi-ekonomi?page=2>, diakses 5 Oktober 2023.
- “Lengkap! Ini Bocoran Asumsi Makro & Postur APBN 2024”, cnbcindonesia.com, 19 September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919124500-4-473678/lengkap-ini-bocoran-asumsi-makro-postur-apbn-2024>, diakses 5 Oktober 2023.
- “Luhut Target Ekonomi RI Capai 6% di 2026”, finance.detik.com, 29 September 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6956337/luhut-target-ekonomi-ri-capai-6-di-2026>, diakses 5 Oktober 2023.
- “Meneropong Ancaman Perlambatan Ekonomi China Terhadap Indonesia”, ekbis.sindonews.com, 2 Oktober 2023, <https://ekbis.sindonews.com/read/1215491/33/meneropong-ancaman-perlambatan-ekonomi-china-terhadap-indonesia-1696234246>, diakses 5 Oktober 2023.
- “RAPBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, anggaran.kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2024:-mempercepat-transformasi-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>, diakses 5 Oktober 2023.
- “Siaran Pers: RAPBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-RAPBN-Tahun-Anggaran-2024>, diakses 5 Oktober 2023.
- “World Economic Outlook Update”, imf.org, 31 Januari 2023, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/01/31/tr-13123-world-economic-outlook-update#:~:text=Global%20year>, diakses 5 Oktober 2023.
- Risalah Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, 21 September 2023.